BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional pasca Perang Dingin diwarnai oleh pergeseran isu yang mempengaruhi kehidupan sistem internasional. Isu ideologi yang sebelumnya mendominasi hubungan internasional dan menjadi fokus para aktor internasional telah tergeser melalui kemunculan sederet isu baru seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, kesetaraan gender, lingkungan hidup, dan sebagainya. Isu lingkungan hidup sendiri menjadi isu global karena kerusakan lingkungan sama halnya mengancam kehidupan manusia selain isu yang dibicarakan saat ini seperti terorisme.

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia saat ini adalah masalah energi. Oleh karenanya persoalan energi merupakan persoalan global. Menurut *International Energy Agency* (IEA), pada tahun 2005 kebutuhan energi setiap harinya di seluruh dunia mencapai 14 terawatt atau 14 triliun watt. Jumlah ini setara dengan 210 juta barel minyak.

Total konsumsi energi tersebut diprediksikan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar 60 terawatt untuk memenuhi permintaan energi dari total penduduk dunia yang mencapai 8 miliar jiwa. Dibandingkan dengan industri di bidang lainnya, industri energi di seluruh dunia juga memiliki perputaran yang lebih besar dengan total mencapai 3 triliun dollar AS per tahunnya. Nilai tersebut

lebih besar dibandingkan dengan industri pertanian yang mencapai 1,3 triliun dollar AS dan industri militer yang hanya 700 miliar dollar AS (*Greeners Magazine 4th edition*, 2005: 8).

Pada kenyataannya, permintaan yang terus meningkat terhadap energi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah pasokan minyak bumi yang saat ini menjadi penyuplai terbesar kebutuhan energi dunia. Bahkan, semakin terbatasnya ladang-ladang minyak di dunia membuat harga minyak terus meningkat. Kondisi inilah yang membuat negara di dunia berpacu tentang penghematan energi dan pemanfaatan teknologi dengan menciptakan energi alternatif yang mampu mengatasi permasalahan energi di dunia.

Persoalan energi merupakan isu yang selalu ramai dibicarakan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketergantungan manusia yang tinggi akan sumber daya ini membuatnya harus berpikir keras tatkala jumlahnya semakin menipis di bumi. Bahkan sekarang kita sudah didesak untuk memikirkan kondisi dimana jika jumlah yang semakin menipis tersebut suatu saat akan benar-benar habis. Ini sangat mungkin terjadi.

Minyak bumi yang kian hari kian menipis sehingga menjadi langka di pasaran sehingga memacu terhadap kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Seperti kenaikan harga BBM yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2004, dimana banyak mengejutkan banyak pihak. Mereka terkejut terhadap besarnya kenaikan yang terjadi. Kenaikan BBM tersebut berdampak pada semua lapisan masyarakat. Mulai lapisan teratas sampai lapisan paling bawah.

National Geographic – Juni 2004 pernah melaporkan bahwa, minyak bumi yang tidak lagi murah mungkin akan segera habis. Kestabilan politik dimana kebanyakan minyak bumi ditemukan, seperti di Teluk Persia, Nigeria, dan Venezuela, membuatnya tidak lagi dapat diandalkan. Penggunaan bahan baku cadangan lain seperti batubara sudah jelas akan menghasilkan karbon dioksida (CO_2) lebih besar ketika proses pembakarannya sehingga akan membuat bumi semakin panas (*Global Warming*) (*Greeners Magazine 4th edition*, 2005: 9).

Global Warming (Pemanasan global) bisa diartikan sebagai menghangatnya permukaan bumi selama beberapa kurun waktu. Pemanasan pada permukaan bumi dikenal dengan istilah ’Efek Rumah Kaca’ atau *Greenhouse Effect*. Sebenarnya efek rumah kaca adalah proses alam yang normal, tapi proses alam yang normal tersebut menjadi tidak sehat sejak manusia memasuki proses industri, terlalu banyak mengkonsumsi bahan bakar fosil, pembakaran batu bara, pembakaran hutan, dan penggunaan energi nuklir. Proses pembakaran energi dari bumi, batu bara, nuklir, dan pembakaran hutan ini ternyata menghasilkan gas buangan yang berupa karbon dioksida. Otomatis, kadar lapisan gas rumah kaca (*greenhouse gases*) yang terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrat oksida, CFCs (*Chlorofluorocarbons*) yang menahan dan memantulkan kembali udara panas ke bumi menjadi semakin banyak (Foley, 1993: 3). Menurut para ilmuwan lingkungan konsentrasi gas rumah kaca bertambah karena pembakaran bahan bakar fosil. Hal tersebut juga diungkapkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Mereka menyimpulkan bahwa: “Sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20

kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia" (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global, diakses pada tanggal 7 Desember 2007).

Dampak pemanasan global tidak hanya dirasakan oleh negara-negara maju tetapi juga dirasakan oleh negara-negara berkembang. Dampak pemanasan global meliputi meningkatnya permukaan air laut yang mendorong meluasnya daerah banjir di dataran rendah, meningkatnya sejumlah daerah yang mengalami kekeringan, munculnya ancaman di sektor pertanian dan perairan, kurangnya air bersih, dan penyebaran penyakit.

Solusi untuk mengatasi dampak pemanasan global ini adalah penggunaan *renewable energy* (energi terbarukan) sebagai sumber energi alternatif dan efisiensi energi (Hasyim, 2005: 109). Yang termasuk sumber-sumber energi terbarukan adalah matahari, angin, biomassa, air, dan panas bumi (geothermal). Penggunaan energi terbarukan dapat memberikan solusi yang ramah lingkungan dan efisien.

Beberapa negara telah melakukan usaha untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintahan beberapa negara Eropa dan Amerika Latin memberikan pajak yang tinggi untuk bahan bakar berbasis bahan bakar fosil, dan memberi insentif untuk bahan bakar berbasis energi terbarukan. Hal itu terbukti efektif mendorong penggunaan energi terbarukan secara optimal. Jerman dan Brasil merupakan contoh negara yang menggunakan energi terbarukan dalam skala yang cukup besar. Jerman merupakan pengguna terbesar energi angin sebagai sumber energi alternatif di dunia. Brasil merupakan produsen etanol

(Etanol merupakan sumber energi alternatif jenis biodiesel dan merupakan hasil sulingan dari sisa pengolahan gula tebu) terbesar di dunia (Kompas, 2005: 46). Selain Brasil, negara-negara yang mulai meningkatkan penggunaan bahan bakar bio (Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan) adalah Swedia, Jerman, Ghana, Austria, Amerika Serikat, dan China. Beberapa negara Asia yang serius mengembangkan energi biodiesel sebagai sumber energi alternatif adalah India dan Vietnam (Kompas, 2005: 13).

Salah satu organisasi non-pemerintah (*International Non-Government Organizations*, INGOs) yang berusaha mengatasi dampak pemanasan global dan menipisnya persediaan minyak bumi adalah Greenpeace. Greenpeace menyatakan bahwa dunia memerlukan sumber energi baru yang berbasis pada energi terbarukan dan efisiensi energi (www.artsarchive.tripod.com, diakses tanggal 28 Februari 2008). Salah satu negara yang menjadi sasaran untuk program kampanye Iklim dan Energi Greenpeace adalah Indonesia. Beberapa alasan mengapa Greenpeace memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi sasaran program kampanye Iklim dan Energi mereka adalah sebagai berikut:

1. Menipisnya energi, konsumsi energi per kapita Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia adalah faktor kunci yang menyebabkan masyarakatnya terjerat dalam kemiskinan.
2. Sekarang ini penggunaan energi yang banyak dijumpai di pedesaan Indonesia adalah lentera-lentera minyak tanah dan tungku-tungku penuh asap yang tidak efisien yang dapat merusak kesehatan.

3. Meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas di dalam dunia yang berkembang akan meningkatkan permasalahan perubahan iklim, yang telah membinasakan banyak hidup masyarakat miskin.
4. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang beresiko paling tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Jika permukaan laut naik, maka banyak daerah di Indonesia akan tenggelam. Greenpeace se-Asia Tenggara meramalkan pada tahun 2030, sampai dengan 72 hektar di Jakarta akan tenggelam, dan pada tahun 2050, 160 hektar di kota tersebut bisa terendam air (Greenpeace dan EREC, 2007: 4).

Sebagai sebuah organisasi global berskala internasional, Greenpeace memusatkan perhatian kepada mempengaruhi kedua pihak yaitu masyarakat dan para pemegang keputusan atas bahaya dibalik penambangan dan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil, memusatkan perhatian sebagai saksi langsung atas akibat dari perubahan iklim global, dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah yang sedang berlangsung. Greenpeace juga berusaha mengupayakan perubahan kebijakan penggunaan energi di Indonesia di masa depan, yaitu beranjak dari ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil ke arah sumber-sumber energi terbarukan, bersih, dan berkelanjutan.

Taktik kampanye Iklim dan Energi Greenpeace adalah mengkonfrontasi industri berbahan bakar yang berasal dari fosil. Terutama, pembangkit listrik pembakar batu bara dan penghasil energi berbasis nuklir. Sementara, di waktu yang sama menyuarakan dan mendorong solusi atas ketergantungan penggunaan

bahan bakar yang berasal dari fosil, serta mempromosikan energi terbarukan seperti energi angin, energi matahari, energi air, dan biomassa modern melalui programnya, yaitu *Energy Revolution* (http://www.greenpeace.org, diakses pada tanggal 28 Februari 2008).

Energy Revolution adalah program kampanye energi terbarukan yang dilakukan oleh Greenpeace di Indonesia yang bertujuan agar Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan pada bahan bakar fosil yang kotor dan menggantinya dengan energi terbarukan yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan bebas polusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan merumuskannya dalam judul: **"PERANAN GREENPEACE DALAM MENGKAMPANYEKAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL"**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu:

1. Pengantar Hubungan Internasional.

   Pada mata kuliah ini diperkenalkan tentang studi ilmu hubungan internasional sebagai suatu bidang studi pembelajaran, sejarah perkembangan, serta para aktor yang terlibat di dalamnya.

2. Organisasi dan Administrasi Internasional.

   Mata kuliah ini membahas sejauh mana peran suatu aktor ilmu hubungan internasional terutama aktor non-negara dalam menciptakan suatu pola interaksi global.

3. Isu-Isu Global.

   Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu apa saja yang menjadi wacana global atau perbincangan masyarakat dunia, seperti lingkungan hidup, kejahatan lintas negara, pengungsi, dan lain sebagainya.

4. Studi Ekonomi Politik di Negara Berkembang.

   Mata kuliah ini melihat permasalahan yang terjadi di negara berkembang, selain itu juga membahas tentang teori pembangunan mengenai lingkungan di negara berkembang.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah (Suriasumantri, 2000: 309).

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan untuk dibahas, yaitu mengenai:

1. Program apakah yang dijalankan Greenpeace dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Greenpeace dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia?

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Greenpeace untuk mengatasi kendala dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia?
4. Bagaimana keberhasilan program Greenpeace dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah seputar peran Greenpeace dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia. Kurun waktu yang dipilih mulai tahun 2006 yaitu awal dari sosialisasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia dan perkembangannya sampai tahun 2008.

1.4 Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **"Sejauh mana peran Greenpeace dalam mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan di Indonesia?"**

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program apa saja yang dijalankan Greenpeace dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Greenpeace dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan Greenpeace untuk mengatasi kendala dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui keberhasilan program Greenpeace dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan peneliti dalam menyusun skripsi di dalam bidang Hubungan Internasional.
2. Memperkaya dan mengembangkan khasanah literatur Hubungan Internasional.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian lanjutan untuk masalah yang sama.
4. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur-alur yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis, yang berarti dalam menghadapi permasalahan yang diajukan maka digunakan teori-teori ilmiah sebagai alat berupa pendekatan yang membantu kita dalam menemukan pemecahan masalah (Suriasumantri, 1998: 316).

Pada dasarnya tujuan utama Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara di dalam interaksi internasional. Perilaku dapat berwujud kerjasama, perang, konflik, pembentukan aliansi dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Walaupun pada kenyataannya aktor yang paling efektif adalah negara, sehingga perilaku internasional yang paling banyak mendapat perhatian dari para analis adalah perilaku negara, namun perlu diperhatikan juga faktor-faktor non-negara. Untuk mempermudah proses penelitian ini, diperlukan adanya landasan untuk memperkuat analisa, dan sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan tema penelitian ini, adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud agar dapat membantu peneliti dalam memahami perbedaan yang besar tentang data dan peristiwa dalam Hubungan Internasional.

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat-pendapat para pakar

Hubungan Internasional dan para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam mengangkat fenomena-fenomena yang ada dan terjadi dalam Hubungan Internasional, peneliti akan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana penopang dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian ini.

Realitas kondisi politik global yang dipengaruhi dengan teknologi informasi mengurangi peranan negara sebagai aktor utama. Pada era globalisasi ini, peranan aktor non-negara (*non-state actors*) meningkat, sehingga muncul keterkaitan antar aktor non-negara dengan aktor negara (*state actors*) sebagai pandangan "pluralis". Salah satu asumsi dasar dalam pandangan pluralis yang dikemukakan **Paul R. Viotti** dan **Mark V. Kauppi** dalam bukunya *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond* menyatakan bahwa:

> **"Peranan aktor non-negara juga penting di dalam hubungan internasional. Hal ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam beragam isu seperti perdagangan internasional, pertahanan, pelucutan senjata, perdamaian dunia, pembangunan sosial budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan serta kampanye penghapusan hambatan perdagangan internasional."** (Perwita dan Yani, 2005: 26)

Isu tentang lingkungan hidup merupakan isu baru dalam hubungan internasional. Runtuhnya Perang Dingin menyebabkan terjadinya perubahan dalam konstelasi politik internasional. Berbagai perkembangan-perkembangan

tersebut mengacu pada kemunculan isu-isu global, yang merupakan hasil dari proses globalisme. Adapun yang dimaksud lingkungan hidup, yaitu:

> **"Seluruh kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme."** (*International Ensyclopedia of the Social Science Volume 5*, 1968: 178)

Lingkungan hidup yang menurun secara kualitatif maupun secara kuantitasnya merupakan perhatian dari masyarakat internasional. Pada prosesnya, permasalahan akan lingkungan hidup merupakan pergeseran dari isu nasional yang berkembang menjadi isu global. Dapat dijelaskan, isu global merupakan permasalahan, dilema, dan tantangan yang secara berkaitan dengan unsur-unsur atau keperluan dasar akan perkembangan dan kemajuan internasional, perdamaian, keamanan, keadilan, kebebasan, dan ketertiban internasional (Boyd dan Pentland, 1981: 5-6). Masalah lingkungan hidup juga merupakan permasalahan politik. Hal tersebut disebabkan karena secara faktual banyak tragedi di lingkungan di negara berkembang bersumber dari proses politik ataupun kebijaksanaan pemerintah (*state-sponsored activities*) yang salah kaprah.

Salah satu hal yang mendesak bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk menangani permasalahan lingkungan hidup pada saat ini adalah mengenai masalah penggunaan energi berbahan bakar fosil yang dapat berdampak pada pemanasan global. Definisi dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

> **"Benturan; Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); Benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu."** (http://kbbi.web.id/index.php?search=dampak, diakses pada tanggal 7 Desember 2008)

Peranan yang buruk dan pudarnya peranan negara dan mekanisme pasar yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan perkembangan sosial (*state and market failure*) mengakibatkan tumbuhnya organisasi-organisasi internasional di negara maju maupun berkembang (De Janvry, 1995: 4). Organisasi-organisasi internasional tersebut muncul sebagai reaksi dari kerusakan lingkungan yang kurang diperhatikan pemerintah yang ada.

Menurut **Teuku May Rudy** dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional* mengemukakan definisi organisasi internasional sebagai berikut:

> **"Organisasi internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda."** (May Rudy, 2005: 3)

Oleh karena itu dalam suatu organisasi internasional terdapat unsur-unsur:

1. kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.
2. mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. baik antar pemerintah maupun non-pemerintah.
4. struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (May Rudy, 2005: 3-4).

Sedangkan peranan organisasi internasional menurut **Clive Archer**, yaitu:

1. Sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Sebagai arena, dimana organisasi internasional merupakan wadah atau forum bagi para anggotanya untuk berdialog, berdebat, maupun menggalang kerjasama.
3. Sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri dan melaksanakan kegiatan yang diperlukan (salah satunya adalah bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup) tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (May Rudy, 2005: 29).

Dalam konteks penelitian ini, peranan yang akan dipakai peneliti untuk menganalisa upaya Greenpeace adalah peranan organisasi internasional sebagai aktor yang independen sekaligus instrumen. Greenpeace melakukan tindakan secara independen, yang bebas dari pengaruh politik dan ekonomi. Selain itu, Greenpeace juga menjadi sarana yang digunakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai suatu tujuan yaitu membangun kesadaran masyarakat dunia untuk bersama-sama mengatasi dampak pemanasan global.

Selain memiliki peranan, organisasi internasional juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Tempat berhimpun bagi negara-negara anggota bila organisasi internasional itu IGO (antar negara/pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi internasional itu masuk kategori INGO (non-pemerintah).

2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim-rejim internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non-anggota (bisa dengan negara lain yang bukan anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainnya).
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota (May Rudy, 2005: 27-28).

Agar tujuan tercapai, fungsi yang dijalankan Greenpeace adalah menyebarkan informasi melalui program kampanye yang dilakukannya agar lingkungan hidup dapat menjadi lebih baik. Misalnya, mempengaruhi kebijakan negara agar menjadi ramah lingkungan, serta berinteraksi dengan masyarakat lokal agar penyebaran informasi lebih tepat sasaran.

Penggolongan organisasi internasional bisa digolongkan dari segi ruang lingkup, fungsi, kewenangan, dan lain sebagainya. Penggolongan organisasi internasional berdasarkan kegiatan administrasinya dapat dibedakan atas:

1. Organisasi Internasional Antar-pemerintah (*Inter-Governmental Organization*) yang lazim disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah, atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.

2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*) yang lazim disingkat NGO. Atau INGO (*Internasional Non-Governmental Organization*) untuk membedakan antara NGO yang internasional dengan NGO yang beruang-lingkup domestik (dalam satu negara). INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olah raga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum perdata (May Rudy, 2005: 5).

Greenpeace digolongkan sebagai NGO internasional karena anggota-anggotanya terdiri dari individu-individu, bukan pemerintahan suatu negara. Untuk menjelaskan mengenai Greenpeace, maka penulis akan menjabarkan teori mengenai NGO secara lebih lanjut. Definisi NGO adalah organisasi yang membantu kelompok minoritas yang miskin, terabaikan, dan tidak memiliki otoritas politik. Mereka mau membantu terciptanya perubahan sosial. Selain itu, NGO mampu memberikan bantuan yang inovatif dan fleksibel serta mampu memberikan bantuan secara personal bagi kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami situasi tertentu (Hadiwinata, 2003: 5).

Pembagian NGO berdasarkan asal mula pembentukannya adalah:

1. *Proverty Alleviation* NGO's.

   Yang muncul sebagai reaksi terhadap proses kemiskinan struktural dan ketidakmampuan terhadap program-program (*top-down*) pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Tujuan utamanya adalah mengentaskan kemiskinan dengan cara membuat program-program pembangunan berdimensi swadaya dan kadang-kadang aktivitas *charity*.

2. *Emancipatory* NGO's.

   Sebagai reaksi atas perkembangan isu makro politik global yang menekankan pada *enlightment* dan emansipasi seperti masalah lingkungan, perempuan, dan anak.

3. *Anti Authoritarian* NGO's.

   Muncul sebagai reaksi terhadap ketimpangan politik yang dianggap kurang kondusif bagi terciptanya demokrasi, kepastian hukum, dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) (Hadiwinata, 2003: 9).

Organisasi internasional pun dapat diklasifikasikan menurut aktivitas-aktivitas yang dijalankan untuk mencapai tujuannya. Klasifikasi itu adalah:

1. Organisasi *High Politic*.

   Memusatkan perhatian pada masalah-masalah diplomasi dan militer yang berkaitan langsung dengan keamanan dan kedaulatan negara-negara dan berhubungan dengan tatanan fundamental sistem internasional.

2. Organisasi *Low Politic*.

   Mengarah pada masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup (Rosenau, Thomson, dan Boyd, 1976: 628).

Dari pengklasifikasian tersebut Greenpeace dikategorikan sebagai *emancipatory* NGO dan merupakan organisasi internasional yang bergelut di bidang *low politic* yakni memfokuskan diri pada isu lingkungan hidup. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh organisasi *low politics* juga bersifat fungsional. Organisasi fungsional ini dianggap lebih mudah dikelola dibanding yang bersifat

politis. Negara-negara telah menunjukkan kesediaannya untuk membatasi kedaulatannya dalam aktivitas-aktivitas fungsional.

Strategi yang dilakukan INGO untuk mencapai tujuannya yang bersifat nasional, subnasional, maupun internasional adalah:

1. Mendesak pemerintahan suatu negara dan/atau membuat kebijakan untuk menjelaskan otoritas yang dimiliki INGO serta menjamin statusnya yang independen dari pemerintah mana pun. Kebijakan ini akan diinstitusikan ke dalam INGO tersebut.
2. Mendukung, mengubah atau melawan kebijakan dan tujuan kebijakan IGO regional maupun global yang berkaitan dengan tujuan INGO.
3. Mendukung, mengubah atau melawan kebijakan dan tujuan serta kepentingan nasional suatu negara yang berkaitan dengan tujuan dan kepentingan INGO (Feld, 1983: 225-226).

Pada tahun 1990-an, NGO menunjukan peranan penting dalam mempengaruhi pembangunan dengan cara yang konstruktif bagi sektor industri dan ekonomi. Hal ini menunjukan bahwa NGO mampu memberikan cara-cara yang lebih inovatif (Hurrel dan Kingsburry, 1992: 113).

Untuk menolak kebijakan yang tidak mendukung pembangunan berkelanjutan pada level nasional dan internasional, usaha penyebaran informasi kepada publik dan pengumpulan dukungan sangat dibutuhkan. Kelompok masyarakat dan NGO berusaha menumbuhkan kesadaran publik dan memberikan tekanan politik bagi pemerintah agar mengambil tindakan. Selain itu, beberapa INGO memberikan laporan mengenai status dan prospek lingkungan hidup global

dan sumber daya alam. Lembaga internasional dan koalisi beberapa NGO memiliki peranan penting untuk meyakinkan adanya dukungan bagi kegiatan NGO lokal dan lembaga-lembaga penelitian. Pemerintah perlu menambah hak-hak NGO, seperti:

1. Mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai lingkungan hidup dan sumber daya alam.
2. Berkonsultasi dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan dampak lingkungan hidup.
3. Mendapatkan bantuan hukum dan ganti rugi ketika lingkungan hidup atau kesehatan mereka mengalami masalah serius (Hurrel dan Kingsburry, 1992: 131-132).

Dengan demikian, NGOs lingkungan hidup dapat membantu mengatasi isu lingkungan hidup ini. Peranan yang dilakukan mereka meliputi hal-hal seperti:

1. Mempengaruhi aksi politik dan publik yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan penempatan isu lingkungan hidup pada level yang lebih tinggi dalam agenda politik negara.
2. Melakukan tindakan berdasarkan penelitian ilmiah.
3. Mempublikasikan masalah lingkungan hidup yang terjadi.
4. Mengatur tekanan terhadap negara, perusahaan serta organisasi internasional lainnya terkait dengan masalah lingkungan hidup (Hurrel dan Kingsburry, 1992: 20).

Bermula dari ketidakpuasan dikalangan pecinta lingkungan hidup yang beranggapan bahwa gagasan pembangunan konvensional (yang menekankan pada

pertumbuhan) telah gagal menjaga keutuhan lingkungan, maka sejak akhir dekade 1980-an munculah gagasan “sustainable development” atau pembangunan berkelanjutan, yang pada dasarnya menghimbau para pelaku pembangunan agar lebih memperhatikan faktor keterbatasan sumber-sumber alam dalam mendesain pelbagai konsep pembangunan. Sumber-sumber alam dalam penelitian ini adalah udara serta atmosfer yang mendukung kehidupan organisme dan mikroorganisme (Hadiwinata, 2002: 209-210).

Menurut konsep pembangunan yang berkelanjutan, hampir setiap aktifitas ekonomi yang dilakukan manusia cenderung menghasilkan limbah yang mempengaruhi kualitas sumber-sumber alam, yakni air, udara, dan tanah. Karena sumber-sumber alam sangat bermanfaat untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka manusia berkepentingan untuk menjaga kelestariannya. Sikap tersebut dicerminkan oleh organisasi non-pemerintah seperti Greenpeace yang berkampanye dan menuntut tegas untuk melindungi lingkungan melalui pengurangan konsumsi bahan bakar fosil dan pengurangan eksploitasi sumber-sumber alam seperti mineral (Hadiwinata, 2002: 217-218).

Untuk mencapai tujuannya, salah satu strategi yang dapat dijalankan oleh organisasi internasional seperti Greenpeace adalah kampanye. Kampanye dapat dilakukan secara lokal, regional maupun global. Kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi. Menurut **T. May Rudy** komunikasi adalah:

> **“Proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian, dengan menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun non-verbal dari seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok**

> **orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan/atau kesepakatan bersama."** (Rudy, 2005: 1)

Greenpeace merupakan salah satu NGO yang melakukan kampanye untuk menyebarkan informasi melalui berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Adanya keterlibatan media massa serta pendekatan secara langsung terhadap masyarakat di berbagai negara mendukung keberhasilan program kampanye Greenpeace.

Salah satu bentuk komunikasi adalah kampanye. Hal ini diperkuat dengan pendapat Rogers dan Storey. Menurut **Rogers** dan **Storey** (1987), definisi kampanye adalah:

> **"Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu."**

Merujuk pada definisi ini maka setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal, yakni:

1. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
2. Jumlah khalayak sasaran yang besar.
3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Di samping keempat ciri pokok di atas, kampanye juga memiliki karakteristik lain, yaitu sumber jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (*campaign makers*), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat

mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat (Venus, 2004: 7).

Ada tiga tahap yang dilakukan dalam kampanye, yaitu:

1. Kegiatan kampanye pada tahap pertama biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini, pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak tentang isu tertentu. Dalam konsep Ostergaard tahap ini merupakan tahap *awareness* yakni menggugah kesadaran, menarik perhatian, dan member informasi tentang produk, atau gagasan yang dikampanyekan.
2. Pada tahap kedua ini, kampanye diarahkan pada perubahan dalam sikap (*attitude*). Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
3. Pada tahap terakhir ini, kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye. Tindakan tersebut dapat bersifat ‘sekali itu saja’ atau terus-menerus (berkelanjutan) (Schenk dan Dobler, 2002: 37).

Menurut **Michael L. Rothschild**, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sebuah program kampanye menjadi tidak sia-sia, yaitu:

1. Arti penting objek kampanye, berkaitan dengan tingkat kepentingan isu-isu yang dikampanyekan. Semakin rendah arti penting sebuah isu maka

semakin rendah pula tingkat perhatian yang akan diberikan khalayak terhadap isu tersebut. Implikasinya adalah kita harus mempertimbangkan secara rasional dan realistis apakah suatu isu cukup penting untuk dikampanyekan.

2. Kadar keterlibatan, menunjukan sejauh mana khalayak telah terlibat dengan isu tersebut. Semakin tinggi tingkat keterlibatan khalayak, semakin penting arti dan tujuan kampanye tersebut bagi mereka.
3. Rasio manfaat dan pengorbanan, menunjukan kalkulasi manfaat dan pengorbanan yang dikeluarkan khalayak bila mereka menerima dan menerapkan gagasan kampanye tersebut.
4. Tuntutan aktual dari lingkungan, menyoroti pandangan dan tuntutan khalayak terhadap isu-isu tertentu. Bila masyarakat menganggap bahwa yang dikampanyekan itu juga keinginan potensial dan harapan kolektif masyarakat, maka program kampanye akan mendapat dukungan dari masyarakat.
5. Segmentasi, menegaskan bahwa gagasan yang tidak memiliki segmen khalayak yang jelas akan mendapat perhatian yang kecil (Venus, 2004: 132).

Greenpeace melakukan kampanye sebagai taktik untuk mencapai tujuannya. Program *Energy Revolution* merupakan bagian dari kampanye Iklim dan Energi Greenpeace yang bersifat global. Tujuan kampanye ini untuk mengatasi tantangan dari industri-industri penghasil bahan bakar fosil serta mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi

alternatif pengganti bahan bakar fosil (http://www.greenpeace.org/seasia/, diakses pada tanggal 17 Maret 2008).

.

1.6.2 Hipotesis

Sebuah hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan, yang dimaksudkan sebagai acuan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Hipotesa-hipotesa ini dijabarkan atau ditarik dari postulat-postulat, dan hipotesa tersebut tidak perlu selalu merupakan jawaban yang mutlak dianggap benar atau yang harus dibenarkan oleh penyelidik, walaupun selalu dapat diharapkan terjadi demikian (Surakhmad, 1982: 39).

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka pemikiran, dan asumsi, penulis dapat menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

"Jika Greenpeace menjalankan perannya sebagai aktor independen dalam mengkampanyekan energi terbarukan di Indonesia melalui program *Energy Revolution* secara maksimal, maka penggunaan energi terbarukan di Indonesia dapat ditingkatkan."

1.6.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mencandra (mendeskripsikan) kegiatan yang harus dilakukan kalau kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi empiris suatu konsep. Melalui definisi seperti itu maka suatu konsep dijabarkan. Dengan demikian maka definisi

operasional berarti juga menjabarkan prosedur pengujian yang memberikan kriteria bagi penerapan konsep itu secara empiris (Mas'oed, 1994: 100).

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan juga hipotesis, maka untuk lebih jelasnya akan dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Greenpeace adalah suatu organisasi lingkungan internasional yang didirikan pada tanggal 15 September 1971. Greenpeace dikenal menggunakan aksi langsung bersama dengan konfrontasi damai dalam melakukan kampanye untuk menghentikan pengujian nuklir angkasa dan bawah tanah, begitu juga dengan kampanye menghentikan penangkapan ikan paus besar-besaran. Pada tahun-tahun berikutnya, fokus organisasi mengarah ke isu lingkungan lainnya, seperti penggunaan pukat ikan, pemanasan global, dan rekayasa genetika (http://id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 16 Februari 2008). Greenpeace se-Asia Tenggara resmi didirikan pada tanggal 1 Maret 2000 dan mendirikan sebuah kantor di Indonesia serta mulai menjalankan aktivitas kampanye di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2006 (http://www.greenpeace.org/seasia/id/about, 1 Juli 2008).
2. Greenpeace sebagai aktor independen, Greenpeace melakukan tindakan secara independen, yang bebas dari pengaruh politik dan ekonomi.
3. Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Venus, 2004: 7).

4. Kampanye energi terbarukan merupakan suatu bentuk atau suatu cara yang dilakukan oleh Greenpeace untuk mengurangi dampak pemanasan global dengan mengkonfrontasi industri-industri yang menggunakan bahan bakar fosil dan dalam waktu yang bersamaan Greenpeace mempromosikan penggunaan energi terbarukan.
5. Energi terbarukan (*renewable energy*) adalah energi-energi yang tidak akan habis jika digunakan atau sumber energi yang dapat didaur ulang. Yang termasuk sumber-sumber energi terbarukan adalah matahari, angin, biomassa, air, dan panas bumi (geotermal) (Daryanto, 2007: 15).
6. *Energy Revolution* adalah program dari kampanye Iklim dan Energi yang dijalankan Greenpeace untuk mengatasi tantangan dari industri-industri penghasil bahan bakar fosil serta mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan, dengan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang kemudian pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti (Nasir, 1988: 63).

Penelitian yang dilaksanakan ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data namun juga analisis dan penelaahan dalam menjelaskan dan memahami makna dari data-data yang dikumpulkan. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul (Silalahi, 1999: 55).

Dalam hal ini peneliti mencoba menggambarkan apa saja yang menjadi latar belakang dan proses Greenpeace dalam mengkampanyekan energi terbarukan dan bagaimanakah hasilnya.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna mendapat sejumlah data dan informasi bagi penulis, dimana dalam penelitian ini yang dipakai adalah cara pengumpulan data *library research*. Teknik pengumpulan data *library research* adalah memungkinkan kita untuk melakukan penelitian melalui studi literatur dengan memilih data atau informasi yang relevan dan mendukung penelitian yang dapat bersumber pada buku-buku referensi, artikel-artikel dan media massa cetak, media internet, dan jurnal-jurnal.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Adapun lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia

   Jl. Dipati Ukur, Bandung.

2. Perpustakan Universitas Parahyangan

   Jl. Ciumbuleuit, Bandung.

3. Greenpeace se-Asia Tenggara Indonesian *Office*

   Jl. Cimandiri 24,Cikini Jakarta Pusat.

4. *Centre for Strategic International Studies* (CSIS)

   Jl. Tanah Abang III/23-27, Jakarta Pusat.

5. Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

   Jl. Merdeka Selatan 18 Jakarta 10110.

6. Kementerian Negara Lingkungan Hidup pemerintah Indonesia

   Jl. DI Panjaitan Kav. 24. Jakarta Timur 13410.

1.8.2 Waktu Penelitian

Penulisan penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2008, dengan perincian seperti tabel berikut:

1.9 Sistematika Penelitian

Peneliti mencoba menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengapa peneliti mengambil masalah ini untuk layak diangkat sebagai sebuah masalah yang perlu diteliti sebagai sebuah karya ilmiah, dimana dalam bab ini terkandung unsur-unsur seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, definisi operasional, metode penelitian dan pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai landasan-landasan teori seperti teori Hubungan Internasional, teori Pluralisme, teori Kampanye, teori Organisasi Internasional dan INGO, teori Lingkungan Hidup, serta teori *Sustainable Development* yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

BAB III

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai organisasi Greenpeace. Hal ini meliputi sejarah perkembangan organisasi; visi, misi, dan prinsip organisasi; peranan dalam isu lingkungan hidup; sumber daya yang dimiliki; struktur organisasi; serta fokus kampanye Greenpeace. Selain itu, bab ini akan membahas pula program-program Greenpeace yang berhubungan dengan masalah

pemanasan global terutama mengenai penggunaan energi terbarukan, termasuk keberhasilan yang sudah tercapai.

Pada bab ini peneliti juga akan memaparkan tentang definisi energi terbarukan, jenis-jenis energi terbarukan, dan memaparkan perkembangan penggunaan energi terbarukan di Indonesia sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

BAB IV

Pada bab ini peneliti akan membahas hasil penelitian, yaitu berupa bentuk-bentuk aktivitas kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace dalam mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan di Indonesia untuk mengurangi dampak pemanasan global. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan faktor-faktor pendorong serta penghambat penggunaan energi terbarukan.

BAB V

Pada bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan hasil penelitian terutama dari pembahasan (BAB IV). Kesimpulan ditulis dalam bentuk rangkuman singkat tapi jelas dan informatif. Pada bagian akhir ditulis suatu penegasan bahwa hipotesis penelitian diterima atau ditolak.